KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	Me.									
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDEN	ITITAS PEI	NERIMA PENGHASILA	AN YANG	G DIPOTONG						
A.1 NP\	A.1 NPWP : 68 807 596 9 722 000									
A.2 NIK :										
A.3 Nama : RIANDY										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
4 21-402-01		3.250.000		3.250.000	0	5	162.500			
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota  B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen										
<del></del>						6 <b>dd</b> 0 4	1 <sub>mm</sub>	2 0 2 2 yyyy		
3.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.										
ᆫ	Nomor : Tanggal dd mm yyyyy									
в.10										
в.11										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 N	NPWP Instan	si Pemerintah :	9 5	3 3 5 0	162722	0 0 0				
C.2 N										
C.3 ID Subunit Organisasi :				$\Box$		ПП	<u> </u>			
C.4 Tanggal :		2 6	2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy							
C.5 N	C.5 Nama Penandatangan :		RIANI	RIANDY						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menya tandatangani secara ele					ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	ı benar dan telah saya		
				i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajal ukan tanda tangan.	c mengatur bahwa c	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		

W6N2C6K3